

**PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA
TERHADAP PENGUNGKAPAN PADA WEBSITE PEMDA**

BARTOLOMEUS DYTA CAHYA TIMOR RUDIYANTO

HERIBERTUS ANDRE PURWANUGRAHA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

Abstrak

Pemerintah Daerah kini dituntut terus-menerus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu wujud pelaksanaan *Good Governance* pemerintah daerah terus melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Di era teknologi yang semakin berkembang saat ini bentuk transparansi dan akuntabilitas publik daerah yaitu dengan cara melakukan pengungkapan informasi mengenai daerah nya dalam *website* yang dimilikinya. Pengungkapan informasi melalui *website* selain biaya murah juga penyampaian informasi akan lebih cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja dan karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan pada *website* pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil sampel 335 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, variabel independen menggunakan data laporan keuangan, sedangkan variabel dependen menggunakan indeks *scoring web*.

Dari hasil analisis tidak ditemukan masalah baik itu pengujian asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, pengujian heteroskedastisitas, pengujian autokorelasi, dan juga pengujian hipotesis.

Hasil dari penelitian ini adalah rasio PAD dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda, rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pada *website* pemda, sedangkan ukuran pemda dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pada *website* pemda.

Kata kunci: Kinerja, Karakteristik, Pengungkapan, *Website* Pemda

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia kini dituntut terus-menerus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari level atas (Pemerintah Pusat) sampai dengan level terbawah (Pemerintah Daerah). Sebagai wujud pelaksanaan *Good Governance*, pemerintah terus melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam segala hal, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah bukan hanya sebatas laporan keuangan dan bukan hanya kepada pemerintah, pemerintah daerah seharusnya mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Penyampaian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui media-media baik elektronik maupun cetak sehingga masyarakat dapat mudah mengaksesnya.

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif murah ketika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional (Bonson dan Escobar, 2005 dalam Puspita dan Martani, 2012). Ini merupakan salah satu isyarat bahwa pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan *e-Government*. Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, murah, dan mudah. Salah satunya adalah melalui *website*. *Website* pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah kepada publik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Rasio PAD berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?
2. Apakah Rasio Ketergantungan (DAU) berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?
3. Apakah Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?
4. Apakah Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?
5. Apakah Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini meneliti mengenai kinerja pemda yang meliputi variabel Rasio PAD dan Rasio Ketergantungan, sedangkan karakteristik pemda meliputi Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, dan Belanja Daerah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian replikasi tentang pengaruh positif dari Rasio PAD, Rasio Ketergantungan, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, dan Belanja Daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam *website* pemda pada tahun 2015.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat praktik penelitian ini adalah membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas *website* Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mahsun dkk, 2012).

2.1.2. Karakteristik

Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu (Syafitri, 2012). Lesmana (2010) dalam Syafitri (2012) mengatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah bersifat khas dari otoritas administratif pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.

2.1.3. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2.1.4. Pengungkapan

Secara sederhana pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya. Oleh karena itu pelaporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang memadai. Pengungkapan yang dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi, jumlah saham yang beredar, harga saham perusahaan dan ukuran-ukuran alternatif lain (Cahyani, 2009).

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh PAD terhadap pengungkapan pada *website* pemda

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa besarkah Pemda dapat menggali sumber pendapatan yang berpotensi pada daerahnya. PAD menunjukkan kinerja daerah untuk menghasilkan pendapatannya secara mandiri. Pemda yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholdernya* bahwa Pemda

telah mengasikkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik (Christiaensens, 1999 dalam Puspita dan Martani, 2012). Berdasarkan pada hasil tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Rasio PAD berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda

2.2.2. Pengaruh rasio ketergantungan (DAU) terhadap pengungkapan pada *website* pemda

Semakin tinggi DAU yang diterima Pemda, menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar terhadap sumber dana lain untuk membiayai aparatnya. Pemda yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana Pemerintah Pusat, maka Pemda tersebut juga memiliki tekanan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak (Liestiani 2008, dalam Puspita dan Martani, 2012). Berdasarkan pada hasil tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Rasio ketergantungan (DAU) berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda

2.2.3. Pengaruh ukuran pemda terhadap pengungkapan pada *website* pemda

Laswad et.al. (2005) dalam Puspita dan Martani (2012) menghubungkan kinerja terhadap *internet financial reporting* dengan ukuran Pemda. Ukuran Pemda digambarkan dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh Pemda. Besarnya aset yang dimiliki Pemda akan menggambarkan seberapa besar ukuran Pemda tersebut. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda

2.2.4. Pengaruh kompleksitas pemerintahan terhadap pengungkapan pada *website* pemda

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, jumlah penduduk mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik setiap daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka diikuti dengan penyediaan layanan publik yang semakin besar pula, dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mengungkapkan segala sesuatu informasi mengenai daerahnya kepada masyarakat. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda

2.2.5. Pengaruh belanja daerah terhadap pengungkapan pada *website* pemda

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki *website* resmi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Hartono, 2013). Berikut merupakan kriteria dari sampel penelitian ini:

1. Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP dan WDP dari BPK.
2. Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki *website* resmi.
3. Pemerintah Daerah yang *website* resminya dapat diakses.
4. Pemerintah Daerah yang *website* resminya memiliki informasi yang relevan mengenai Pemerintah Daerah tersebut.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 335 Kapubapet/Kota yang berada di seluruh Indonesia

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara. Data variabel dependen berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) pada semester pertama. Data variabel dependen dalam penelitian ini adalah menggunakan daftar *scoring* indeks pengungkapan sukarela Pemda dalam *website* Pemda. Variabel yang digunakan pada penelitian ini:

1. Variabel Dependen : Pengungkapan pada *Website* Pemda
2. Variabel Independen :
 1. Rasio PAD
 2. Rasio Ketergantungan (DAU)
 3. Ukuran Pemda
 4. Kompleksitas Pemerintahan
 5. Belanja Daerah

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis, variabel Rasio PAD memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 1,00, *mean* 0,0935, dan standar deviasi sebesar 0,09116. Berdasarkan hasil analisis, variabel Rasio Ketergantungan (DAU) memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 3,81, *mean* 0,5864, dan standar deviasi sebesar 0,22930. Berdasarkan hasil analisis, variabel Ukuran Pemda memiliki nilai minimum 11,58, nilai maksimum 13,57, *mean* 12,3432, dan standar deviasi sebesar 0,27118. Berdasarkan hasil analisis, variabel Kompleksitas Pemerintahan memiliki nilai minimum 4,64, nilai maksimum 6,54, *mean* 5,5853, dan standar deviasi sebesar 0,39323. Berdasarkan hasil analisis, variabel Belanja Daerah memiliki nilai minimum 9,880, nilai maksimum 12,704, *mean* 11,98341, dan standar deviasi sebesar 0,245736. Berdasarkan hasil analisis, variabel Pengungkapan Total Untuk Website Pemda memiliki nilai minimum 0,03, nilai maksimum 0,74, *mean* 0,4112, dan standar deviasi sebesar 0,11032.

4.2. Pengujian Asumsi Klasik

4.2.1. Pengujian Normalitas

Hasil pengujian normalitas untuk menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* pada penelitian ini menunjukkan bahwa untuk $N = 335$, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai 0,896 yang berarti nilai tersebut diatas 0,05. Kesimpulannya adalah data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

4.2.2. Pengujian Multikolinearitas

Suatu model regresi dikatakan tidak multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai dari *VIF (Variance Inflation Factor)* kurang dari 10. Dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* semua lebih dari 0,1 dan nilai dari *VIF* semua kurang dari 10, maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3. Pengujian Heteroskedastisitas

Model regresi dikatakan terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi pada uji heteroskedastisitas dengan metode *Glejser* menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka didalam model regresi ini terjadi heteroskedastisitas Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi pada penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai variabel dalam signifikansi *std. Error* nilainya lebih dari 0,05.

4.2.4. Pengujian Autokorelasi

Untuk mengetahui terjadi tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi maka akan dibandingkan nilai *Durbin-Watson* yang tertera pada tabel dengan nilai yang terdapat pada tabel *DW-Test* pada tingkat signifikansi 5%, dengan $n = 335$, dan jumlah variabel independen sebanyak 5. *Durbin-Watson (DW)* terletak diantara DU sampai dengan $4-DU$, $DU < Durbin-Watson < 4-DU$, dengan DU 1,858 (tabel *DW-Test*), maka persamaannya $1,858 < DW < 2,142$, nilai *Durbin-Watson* pada penelitian ini adalah sebesar 1,954. Dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini bebas dari gangguan autokorelasi.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Pengujian nilai t

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Nilai t

Mode l	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t B	Sig. Std. Error	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,005	,426		-,012	,991
	Rasio PAD	,349	,079	,288	4,406	,000
	Rasio Ketergantungan (DAU)	-,071	,029	-,147	-2,437	,015
	Ukuran Pemda	,024	,035	,058	,679	,497
	Kompleksitas Pemerintahan	,035	,021	,125	1,657	,098
	Belanja Daerah	-,005	,040	-,012	-,131	,896

a Dependent Variable: Pengungkapan Pada Website Pemda

Sumber: Data yang diolah (2015)

Tabel 4.1 menunjukkan nilai signifikansi untuk tiap-tiap variabel independen, yaitu: (1) Rasio PAD memiliki nilai signifikansi 0,000, (2) Rasio Ketergantungan (DAU) memiliki nilai signifikansi 0,015, (3) Ukuran Pemda memiliki nilai signifikansi 0,497, (4) Kompleksitas Pemerintahan memiliki nilai signifikansi 0,098, (5) Belanja Daerah memiliki nilai signifikansi 0,896.

Berdasarkan tabel tersebut, maka pengaruh dari masing-masing variabel independen dapat diukur signifikansinya. Variabel yang berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen antara lain Rasio PAD, Rasio Ketergantungan (DAU), dan Kompleksitas Pemerintahan dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari α 0,1. Sedangkan Ukuran Pemda dan Belanja Daerah tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari α 0,1.

Model regresi dapat disusun berdasarkan tabel 4.1 adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$= -0,005 + 0,349 X_1 - 0,071 X_2 + 0,024 X_3 + 0,035 X_4 - 0,005 X_5 + e$$

Keterangan:

Y	=	Variabel Dependen (Pengungkapan Pada Website Pemda)
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien
X ₁	=	Variabel Independen (Rasio PAD)
X ₂	=	Variabel Independen (Rasio Ketergantungan)
X ₃	=	Variabel Independen (Ukuran Pemda)
X ₄	=	Variabel Independen (Kompleksitas Pemerintahan)
X ₅	=	Variabel Independen (Belanja Daerah)
e	=	Error

4.3.2. Pengujian Nilai F

Pengujian nilai F dilakukan untuk menguji apakah model persamaan regresi dikatakan *fit*. Model regresi dikatakan *fit*, saat signifikansi uji $F \leq 0,1$. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan:

Tabel 4.2
Pengujian Nilai F

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,409(a)	,168	,155	,10141

a Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan (DAU), Rasio PAD, Kompleksitas Pemerintahan, Ukuran Pemda

Sumber: Data yang diolah (2015)

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,681	5	,136	13,252	,000(a)
	Residual	3,384	329	,010		
	Total	4,065	334			

a Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan (DAU), Rasio PAD, Kompleksitas Pemerintahan, Ukuran Pemda

b Dependent Variable: Pengungkapan Pada Website Pemda

Sumber: Data yang diolah (2015)

Berdasarkan tabel 4.2, hasil pengujian mengindikasikan *Adjusted R Square* sebesar 0,155 atau sebesar 15,5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini variabel yang terdiri dari rasio PAD, rasio ketergantungan (DAU), ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen pengungkapan pada website pemda sebesar 15,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 84,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini

Berdasarkan tabel 4.2, model persamaan regresi dalam penelitian ini dikatakan *fit*, karena nilai signifikansinya adalah 0,000, yaitu kurang dari 0,1.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Rasio PAD terhadap Pengungkapan pada Website Pemda

Hasil pengujian nilai t pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel independen Rasio PAD memiliki nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dibandingkan nilai alpha 0,1 dan B bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa Rasio PAD berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda. PAD menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah.

PAD menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam kemampuannya menggali potensi pendapatan yang ada di daerahnya. Dalam proses pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk terbuka dalam mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahan kepada rakyat. Semakin berkembangnya teknologi, website adalah salah satu media yang paling mudah, paling murah, dan paling cepat dalam penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Semakin baik kinerja pemerintah daerah, semakin baik dan semakin terbuka pula pemerintah daerah mengungkapkan informasi kepada masyarakat dalam website resmi yang dimilikinya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Puspita dan Martani (2012) yaitu rasio PAD tidak berpengaruh pada pengungkapan informasi dalam website pemda.

4.4.2. Pengaruh Rasio Ketergantungan (DAU) terhadap Pengungkapan pada Website Pemda

Hasil pengujian nilai t pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel independen Rasio Ketergantungan (DAU) memiliki nilai signifikansi 0,15 yang lebih besar dibandingkan nilai alpha 0,1 dan B bernilai negatif. Ini menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan (DAU) berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU menandakan seberapa besar pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Semakin kecil pemerintah daerah menerima DAU, maka pemerintah tersebut dianggap semakin mandiri karena dapat mengelola sumber pendapatan daerahnya dengan baik. Ini mendorong Pemerintah Daerah mengungkapkan informasi pada website nya lebih tinggi.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Puspita dan Martani (2012) yaitu rasio ketergantungan (DAU) berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi dalam website pemda.

4.4.3. Pengaruh Ukuran Pemda terhadap Pengungkapan pada Website Pemda

Hasil pengujian nilai t pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel independen Ukuran Pemda memiliki nilai signifikansi 0,497 yang lebih besar dibandingkan nilai alpha 0,1. Ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda. Ukuran pemda dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah aset pemda. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemda yang memiliki aset tinggi tidak serta merta melakukan pengungkapan pada *website* yang dimilikinya secara tinggi pula.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Puspita dan Martani (2012) dimana Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap Pengungkapan pada Website Pemda. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afryansyah (2013), dimana kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

4.4.4. Pengaruh Kompleksitas Pemerintahan terhadap Pengungkapan pada Website Pemda

Hasil pengujian nilai t pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel independen Kompleksitas Pemerintahan memiliki nilai signifikansi 0,098 yang lebih kecil dibandingkan nilai alpha 0,1 dan B bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh positif Pengungkapan Pada Website Pemda. Kompleksitas pemerintah dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah. Semakin jumlah penduduk dalam suatu daerah itu besar, maka Pemda di daerah tersebut dituntut lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai daerahnya dalam website yang dimilikinya, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Puspita dan Martani (2012) dimana Kompleksitas Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan pada Website Pemda.

4.4.5. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda

Hasil pengujian nilai t pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel independen Belanja Daerah (BD) memiliki nilai signifikansi 0,896 yang lebih besar dibandingkan nilai alpha 0,1. Ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dengan kata lain, belanja daerah digunakan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang tinggi tidak serta merta membuat Pemda untuk mengungkapkan informasi yang tinggi pula dalam websitenya. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa belanja yang tinggi tidak mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi, sehingga belanja secara otomatis tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada *website* Pemda (Puspita dan Martani, 2012)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Puspita dan Martani (2012) dimana Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan pada Website Pemda.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV serta dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa.

1. Variabel Independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen (Pengungkapan pada Website Pemda) adalah Rasio PAD (X_1), Rasio Ketergantungan (DAU) (X_2), dan Kompleksitas Pemerintahan (X_4) oleh karena itu:
 - a. Dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima artinya Rasio PAD berpengaruh positif terhadap Pengungkapan pada Website Pemda.
 - b. Dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak artinya Rasio Ketergantungan (DAU) berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan pada Website Pemda.
 - c. Dapat disimpulkan bahwa H_{a4} diterima artinya Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan pada Website Pemda.
2. Variabel Independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Pengungkapan pada Website Pemda) adalah Ukuran Pemda (X_3), Belanja Daerah (X_5), oleh karena itu:
 - a. Dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak artinya Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan pada Website Pemda.
 - b. Dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak artinya Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan pada Website Pemda.

Daftar Pustaka

- Afryansyah, R. D. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet oleh Pemerintah Daerah*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 3, 1-11.
- Dewi, A. S. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia)*. Skripsi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogiyanto. 2010. *Metodologi penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman (edisi pertama)*. Yogyakarta: BPFEE.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFEE.
- Kuncahyo, W. S. (2013, September 29). *Kantor Berita Politik*. Dipetik Mei 23, 2014, dari Kantor Berita Politik:
<http://politik.rmol.co/read/2013/09/29/127350/Pemda-Pelit-Informasikan-Alokasi-Anggaran->
- Lestari, puji. 2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. Media keuangan Vol. II No. 17 Tahun 2010.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: IKAPI.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Priyanto, Duwi. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta, Andi.
- Nuswandari, Cahyani. 2009. *Pengungkapan Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Signalling Theory*. Kajian Akuntansi Vol. 1 No. 1 Tahun 2009.
- Puspita, Rora & Martani, Dwi. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV. Republik Indonesia. 2013.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Santoso, S. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariabel*. Jakarta: Gramedia.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sutomo, Ibnu. 2004. *Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela pada Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Go Publik di BEJ)*. Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Suwadjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Syafitri, Febriani. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Praktik SPSS untuk Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wikipedia. (2015, Oktober 6). *Wikipedia*. Dipetik Oktober 17, 2015, dari Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web.
- Wikipedia. (2013, April 17). *Wikipedia*. Dipetik Oktober 17, 2015, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.